

# Perilaku Politik terhadap Dinasti Politik Lokal di Jambi

**Sri Nuryeni Saragih<sup>1</sup>, Rut Diana Mart D. Hasibuan<sup>2</sup>, Jane Brasta<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespodensi: [srinuryenisaragih@gmail.com](mailto:srinuryenisaragih@gmail.com)

Diterima: 16-06-2026 | Disetujui: 21-06-2026 | Diterbitkan: 23-06-2026

## ABSTRACT

*This study aims to analyse the political behaviour of the public, particularly young voters, towards the phenomenon of local political dynasties in Jambi. Political dynasties are a growing phenomenon in local democracy and are often associated with elite domination and limited circulation of power. This study employs a qualitative and normative descriptive method, involving a review of literature and journals. Furthermore, the study adopts a psychological approach and examines how theoretical frameworks relate to the analysis of political dynasties. The findings indicate that there is critical awareness regarding political dynasties; however, in practice, the political behaviour of the public remains influenced by social and cultural factors, as well as the provision of services by certain groups. This reflects a gap between the ideal values of democracy and the reality of local politics. Furthermore, this study reveals that the continuity of leadership within a single family is driven by strong social capital, extensive kinship networks, established economic capital, and symbolic capital such as proximity to the majority ethnic group. Furthermore, the positive image and trust associated with the candidate's prominent family name also served as factors that secured the candidate's victory in the electoral process in Jambi. The research findings indicate that political dynasties often hinder the regeneration of democratic leadership and foster a culture of nepotism.*

**Keywords:** *political behaviour, political dynasties, local democracy.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku politik masyarakat, khususnya pemilih muda, terhadap fenomena dinasti politik lokal di Jambi. Dinasti politik menjadi fenomena yang terus berkembang dalam demokrasi lokal dan sering dikaitkan dengan dominasi elit serta terbatasnya sirkulasi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan normatif dengan mengkaji literatur dan jurnal. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan psikologis dan mengkaji bagaimana keterkaitan teori dalam analisis dinasti politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesadaran kritis terhadap dinasti politik, namun dalam praktiknya perilaku politik masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan bantuan jasa oleh sekelompok orang. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai ideal demokrasi dan realitas politik lokal. Selain itu penelitian ini mengungkap bahwa bertahannya kepemimpinan satu keluarga didorong oleh modal sosial yang kuat, jaringan kekerabatan yang luas, modal ekonomi mapan, dan modal simbolik seperti kedekatan dengan suku mayoritas. Selain itu juga, citra positif dan kepercayaan terhadap nama keluarga besar kandidat juga menjadi faktor yang menjadikan kandidat sebagai pemenang dalam proses pemilihan di Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik sering kali menghambat regenerasi kepemimpinan yang demokratis dan menyuburkan budaya nepotisme.

**Kata kunci:** perilaku politik, dinasti politik, demokrasi lokal.

#### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Saragih, S. N. ., Mart D. Hasibuan, R. D., & Brasta, J. (2026). Perilaku Politik terhadap Dinasti Politik Lokal di Jambi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 2100-2108. <https://doi.org/10.63822/wx0v3k69>

## PENDAHULUAN

Keberadaan dinasti politik dalam sistem demokrasi yang berkepanjangan memicu kekhawatiran atas terbentuknya oligarki kekuasaan. Hal ini menciptakan ketimpangan akses politik yang signifikan, di mana distribusi kekuasaan hanya berputar di lingkaran elite tertentu. Fenomena ini mencerminkan defisit representasi demokratis, di mana prinsip meritokrasi tergeser oleh logika kekuasaan yang bersifat akumulatif sebagaimana konsep '*power begets power*' (kekuasaan melahirkan kekuasaan) yang pada akhirnya menghambat munculnya pemimpin baru dari luar lingkaran kekuasaan.

Dalam sebuah demokrasi yang sehat, setiap orang seharusnya tanpa memandang siapa orang tuanya atau apa nama belakangnya sudah sepantasnya punya kursi yang sama di meja politik. Kita memimpikan sebuah sistem di mana anak seorang petani atau guru memiliki peluang yang sama dengan anak seorang pejabat untuk memimpin daerahnya. Namun sayangnya, tembok tinggi bernama dinasti politik sering kali menutup pintu bagi bakat-bakat baru ini. Ketika jabatan publik mulai terasa seperti 'warisan keluarga', politik jelas mulai kehilangan jiwanya. Alih-alih pengabdian tulus untuk rakyat, politik justru terjebak dalam pragmatisme yang hanya sibuk memastikan kekuasaan tetap berputar di lingkaran kerabat saja.

Pada dasarnya, fenomena dinasti politik senantiasa memicu perdebatan dan selalu berada di tengah pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan program pembangunan. Namun di sisi lain, banyak yang mengkritik bahwa dinasti politik tak lebih dari sekadar strategi untuk memelihara status *quo* dan melanggengkan atau memperpanjang masa kekuasaan di lingkaran keluarga saja. Realitas ini sering kali menciptakan sebuah tembok tinggi bagi wajah-wajah baru yang kompeten namun minim dukungan modal sosial dan politik. Mengingat calon dari garis keturunan penguasa biasanya memiliki sokongan sumber daya yang jauh lebih masif, kesempatan masyarakat umum untuk berpartisipasi secara setara dalam panggung politik pun kian menyempit.

Fenomena dinasti politik di tingkat lokal mulai berkembang sejak diterapkannya Pemilu langsung pada tahun 2005 serta pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001. Kedua kebijakan ini, yang dimaksudkan sebagai bentuk demokratisasi di tingkat lokal, justru membuka ruang bagi munculnya berbagai elit daerah yang berupaya menguasai dan memanfaatkan proses tersebut. Kehadiran para elit dalam dinamika demokrasi lokal ini sering disebut sebagai proses reorganisasi kekuasaan.

Reorganisasi kekuasaan tersebut dapat dipahami sebagai kembalinya dominasi politik elit lokal dalam sistem demokrasi. Pada masa Orde Baru, kekuasaan elit lokal cenderung dikendalikan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme pengangkatan dan penunjukan langsung. Kondisi ini menyebabkan terjadinya polarisasi di kalangan elit lokal, yaitu antara mereka yang menjadi pendukung rezim Orde Baru dan memperoleh keuntungan politik, serta kelompok elit yang menentang kekuasaan tersebut sehingga tersisih dari panggung politik di daerahnya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian umumnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan normatif dengan mengkaji literatur dan jurnal. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang mempunyai spesifikasi sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Sedangkan normatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian dinasti politik dengan prinsip demokrasi dan regulasi politik di Indonesia. Jenis dan sumber data

dalam penelitian ini berasal dari jurnal dan beberapa media yang mengangkat kasus dinasti politik yang ada di jambi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku politik secara etimologis merupakan kata terjemahan dari bahasa Inggris yakni *political behaviour*, kata tersebut terdiri dari dua suku kata yakni kata *political* dan *behavior*, dalam kamus Oxford dijelaskan bahwa kata *political* berarti hal-hal yang menyangkut negara, warga negara, pemerintahan dan kebijakan. Sedangkan arti kata dari *behavior* adalah cara seseorang dalam melakukan hubungan dengan pihak luar.

Sedangkan jika ditelusuri dalam pengertian bahasa Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap tidak saja ucapan akan tetapi gerak tubuh atau badan, sedangkan politik adalah segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara dan negara lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perilaku politik adalah suatu bentuk keikutsertaan warga negara dengan cara yang terorganisir dalam membuat keputusan-keputusan politik, dengan keikutsertaan yang sukarela dan atas kemauan sendiri, didasari atas rasa tanggung jawab terhadap tujuan-tujuan sosial secara umum, dan dalam koridor kebebasan berfikir, bertindak, dan kebebasan mengemukakan pendapat.

Menurut ramlan surbakti ada 5 jenis pendekatan yang digunakan untuk menganalisis perilaku pemilih yaitu:

1. Pendekatan sosiologis
2. Pendekata psikologis
3. Pendekatan ekologis
4. Pendekatan struktural
5. Pendekatan pilihan rasional

Pendekatan Sosiologis (*The Columbia School*), menitikberatkan pada karakteristik sosial pemilih. Keputusan memilih dianggap sebagai refleksi dari kelompok sosial di mana pemilih berada, seperti latar belakang agama, kelas sosial (ekonomi), etnis, atau wilayah tempat tinggal.

Pendekatan Psikologis (*The Michigan School*), melihat perilaku pemilih berdasarkan kondisi internal atau kejiwaan individu. Fokus utamanya adalah identifikasi partai (ikatan emosional pada partai tertentu), persepsi terhadap figur kandidat, serta isu-isu politik yang sedang hangat.

Pendekatan Ekologis, menganalisis hubungan antara lingkungan fisik atau geografis dengan pola perolehan suara. Analisis dilakukan dengan memetakan persebaran suara di wilayah tertentu untuk melihat apakah faktor lokasi atau kepadatan penduduk memengaruhi kecenderungan politik.

Pendekatan Struktural, berfokus pada pengaruh struktur politik, sistem pemilu, dan aturan main kenegaraan terhadap cara orang memilih. Misalnya, bagaimana sistem proporsional atau sistem distrik memaksa pemilih untuk berpikir dua kali sebelum memilihnya.

Pendekatan Pilihan Rasional (*Rational Choice*), memandang pemilih sebagai konsumen yang logis. Pemilih akan menghitung untung-rugi (*cost-benefit*) dari pilihannya. Mereka akan memilih kandidat yang dianggap mampu memberikan keuntungan maksimal atau kebijakan yang paling menguntungkan bagi kepentingan pribadi mereka.

Fenomena dinasti politik di tingkat lokal mulai menguat seiring dengan momentum besar demokratisasi di Indonesia, yaitu pemberlakuan Otonomi Daerah pada tahun 2001 dan penyelenggaraan Pilkada langsung perdana pada tahun 2005. Transisi ini memberikan ruang bagi bangkitnya elit-elit daerah yang berusaha mengooptasi proses demokrasi demi kepentingan kelompoknya.

Dalam studi demokrasi lokal, kemunculan kembali para elit ini sering disebut sebagai reorganisasi kekuasaan. Jika pada era Orde Baru kekuasaan elit lokal sangat dibatasi oleh kontrol ketat pemerintah pusat melalui mekanisme penunjukan langsung, maka di era reformasi, para elit ini berhasil mengonsolidasikan kembali pengaruh politik mereka dalam sistem yang lebih terbuka.

Meskipun kerangka Hukum Tata Negara kita menjunjung tinggi demokrasi dan otonomi yang akuntabel, praktik di lapangan sering kali bercerita lain. Munculnya politik dinasti dimana kekuasaan terkonsentrasi pada lingkaran keluarga tertentu telah menciptakan distorsi atau biasa disebut dengan penyelewengan serius terhadap cita-cita pemerintahan yang bersih. Praktik ini bertindak sebagai penghalang bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang potensial dan justru melanggengkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Akibatnya, esensi demokrasi yang seharusnya inklusif berubah menjadi sistem yang diskriminatif, menutup pintu bagi masyarakat luas untuk ikut serta secara adil dalam mengelola negara.

Dinasti politik sendiri adalah istilah yang paling umum digunakan untuk mendefinisikan siklus kekuasaan yang hanya melanjutkan kekuasaan sebelumnya, dan politik lokal menjadi ranah dari banyak studi yang telah ada. Fenomena munculnya sentimen kekeluargaan dalam politik lokal di Indonesia dipahami sebagai hasil kombinasi politik sentrifugal (sentralisasi) pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto dan tekanan politik sentripetal (desentralisasi) pasca Soeharto. Fenomena dinasti politik dalam lanskap lokal Indonesia merupakan sebuah siklus kekuasaan yang bekerja secara melingkar, di mana otoritas pemerintahan cenderung direproduksi dan dilanggengkan oleh lingkaran keluarga penguasa sebelumnya. Secara historis, kemunculan sentimen kekeluargaan ini dipahami sebagai hasil dialektika antara warisan politik sentrifugal atau pemusatan kekuasaan pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, yang kemudian bertemu dengan tekanan politik sentripetal atau arus desentralisasi yang masif pasca-1998. Masa transisi ini memberikan ruang bagi elit daerah untuk melakukan reorganisasi kekuasaan, di mana mekanisme penunjukan langsung oleh pusat berganti menjadi konsolidasi kekuatan lokal yang berbasis pada ikatan primordial. Dalam praktiknya, dinasti politik ini bermanifestasi melalui penetrasi aktor-aktor domestik seperti pasangan, anak, hingga kerabat dekat petahana ke dalam berbagai kontestasi politik, baik melalui pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif demi menjaga keberlangsungan pengaruh keluarga.

Keberlangsungan dinasti ini sering kali didukung oleh akumulasi berbagai bentuk modal yang saling bertukar, mulai dari modal ekonomi untuk membiayai logistik politik hingga modal simbolik berupa nama besar yang memberikan legitimasi di mata masyarakat. Di wilayah seperti Desa Tangkit Baru, bertahannya praktik ini bahkan kerap dipandang sebagai bagian dari pelestarian adat dan budaya lama yang masih kental, sehingga masyarakat cenderung mengikuti pola kepemimpinan yang sudah mapan daripada mencari figur baru. Namun, secara teoretis, dominasi klan tertentu ini menciptakan distorsi serius terhadap prinsip demokrasi, desentralisasi, dan akuntabilitas yang seharusnya inklusif. Alih-alih melahirkan regenerasi kepemimpinan yang sehat berdasarkan meritokrasi, politik dinasti justru membangun struktur oligarki yang eksklusif dan mempersempit ruang partisipasi bagi warga biasa yang kompeten namun tidak memiliki dukungan modal sosial yang serupa. Hal ini pada akhirnya mengubah esensi pemerintahan dari

pengabdian untuk rakyat menjadi sekadar instrumen pragmatisme politik yang hanya menguntungkan segelintir elite penguasa.

Fenomena dinasti politik yang terjadi di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi ini mencerminkan sebuah realitas sosiopolitik di mana kekuasaan terkonsentrasi pada lingkaran keluarga tertentu dalam jangka waktu yang lama. Secara deskriptif, kasus ini menunjukkan bahwa suksesi kepemimpinan desa tidak hanya bersandar pada mekanisme pemilihan formal, tetapi sangat dipengaruhi oleh penguasaan modal sosial, ekonomi, dan politik yang diwariskan secara turun-temurun. Keluarga yang mendominasi biasanya memiliki status sebagai tokoh perintis atau elit lokal yang dihormati, sehingga menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap figur tersebut. Hal ini menyebabkan kompetisi dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) cenderung tidak seimbang, karena calon dari luar lingkaran dinasti seringkali kalah dalam hal jaringan patronase dan sumber daya kampanye dibandingkan dengan petahana atau kerabatnya.

Dilihat dari sisi tata kelola pemerintahan, keberadaan dinasti politik di desa ini menciptakan stabilitas politik yang cukup kuat karena kebijakan pembangunan cenderung berkesinambungan tanpa adanya gejolak oposisi yang berarti. Namun, kondisi ini membawa risiko pada kualitas demokrasi lokal karena rekrutmen perangkat desa dan pengambilan keputusan berpotensi menjadi eksklusif dan bersifat kekeluargaan. Meskipun secara hukum hal ini sah setelah putusan Mahkamah Konstitusi mencabut larangan bagi kerabat petahana untuk mencalonkan diri, praktik di Tangkit Baru tetap menjadi catatan kritis mengenai lemahnya sistem kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*). Pada akhirnya, dominasi keluarga ini menempatkan Desa Tangkit Baru dalam situasi di mana efektivitas pemerintahan sangat bergantung pada integritas personal sang pemimpin, sementara ruang bagi kemunculan pemimpin alternatif dari masyarakat umum menjadi semakin sempit.

Pada dasarnya, dinasti politik muncul dari proses pemilu yang secara formal merupakan bagian dari mekanisme demokrasi prosedural. Namun, dalam perkembangannya, kekuasaan tersebut perlahan menguat dan meluas layaknya sistem kerajaan, dengan kepala daerah sebagai pusat kekuasaan utama. Kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk distorsi terhadap prinsip suksesi dalam demokrasi, di mana pergantian kepemimpinan seharusnya menjadi hal yang niscaya. Di sisi lain, respons masyarakat sebagai pemegang kedaulatan justru terfragmentasi, mulai dari yang mendukung, bersikap netral, hingga yang menolak keberadaan dinasti politik. Variasi sikap publik tersebut menunjukkan adanya bentuk penerimaan sekaligus keterkaitan antara masyarakat dengan dinasti politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam proses atau kasus yang terjadi di Tangkit ini berdampak signifikan terhadap demokrasi lokal. Dimana demokrasi lokal adalah sebuah sistem pemerintahan di tingkat daerah yang mana masyarakat memiliki hak dan kesempatan langsung untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Berbeda dengan demokrasi nasional yang bersifat makro, demokrasi lokal merupakan subsistem yang mendekatkan hubungan antara pemerintah daerah dengan rakyat di lingkungannya. Secara sederhana, demokrasi lokal adalah cara warga di suatu daerah (seperti desa, kota, atau kabupaten) untuk ikut menentukan nasib daerahnya sendiri. Ini adalah ruang bagi masyarakat untuk bersuara, mengawasi kebijakan, dan memilih pemimpin mereka sendiri di tingkat bawah agar pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal, bukan sekadar perintah dari pusat.

Perjalanan demokrasi lokal kita dimulai dari budaya musyawarah desa yang turun-temurun. Dulu, pada masa Orde Baru, kekuasaan di daerah sangat dibatasi oleh pemerintah pusat. Namun, setelah

Reformasi 1998, kedaulatan itu dikembalikan ke tangan rakyat daerah. Kini, kita mengenal otonomi daerah yang mengizinkan warga memilih pemimpinnya sendiri dan mengatur rumah tangganya secara mandiri.

Sistem ini bekerja dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusannya sendiri. Intinya ada pada tiga hal: pemilihan pemimpin yang transparan (Pilkada), keterlibatan aktif warga dalam memberikan masukan, dan adanya pengawasan dari dewan perwakilan (DPRD). Dengan sistem ini, daerah tidak lagi hanya menunggu instruksi, tapi bisa berkreasi membangun wilayahnya sesuai identitas dan kebutuhan warganya.

Salah satu contoh kasus dinasti politik lokal di Jambi yang kami teliti adalah kasus dinasti politik yang terjadi di Desa Tangkit Baru, Muara Jambi, Jambi. Keberlangsungan dinasti politik di Desa Tangkit Baru merupakan hasil dialektika antara struktur sosial yang dominan dan mekanisme kejiwaan masyarakat yang saling mengunci. Penelitian mengenai fenomena dinasti politik di Desa Tangkit Baru, Muara Jambi, mengungkapkan sebuah realitas sosiopolitik yang kompleks, di mana suksesi kepemimpinan desa tidak lagi berjalan berdasarkan meritokrasi murni, melainkan melalui sirkulasi kekuasaan di dalam lingkaran internal keluarga kepala desa. Secara analitis, keberlangsungan dinasti ini merupakan manifestasi dari penguasaan modal simbolik dan modal sosial yang terakumulasi melalui identitas kesukuan, khususnya dominasi suku Bugis yang memiliki struktur kekerabatan yang solid dan hierarkis. Dalam konteks masyarakat hukum adat atau desa dengan basis etnis yang kuat, loyal

itas politik sering kali bersifat primordial; dukungan diberikan bukan sekadar karena visi misi program kerja, melainkan karena adanya rasa keterikatan batin dan kewajiban moral terhadap tokoh yang dianggap sebagai representasi kelompok atau "penjaga" tradisi mereka.

Melalui pendekatan kualitatif, ditemukan bahwa struktur dinasti politik di desa ini tetap kokoh berkat adanya konsolidasi identitas suku Bugis yang berfungsi sebagai jangkar dukungan sosial primer. Jaringan masyarakat yang kuat dan sistem patronase yang mengakar memungkinkan keluarga kepala desa untuk melakukan reproduksi kekuasaan secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fenomena ini membuktikan bahwa faktor kedekatan darah dan solidaritas kelompok sering kali menjadi instrumen utama dalam mempertahankan otoritas politik di tingkat desa, yang pada akhirnya membentuk pola kepemimpinan yang bersifat oligarkis di tengah prosedur demokrasi formal.

Secara sosiologis, kekuasaan yang terus berputar di lingkaran keluarga di Desa Tangkit Baru bisa kita pahami melalui kacamata Pierre Bourdieu tentang modal dan kebiasaan yang mengakar (*habitus*). Jabatan kepala desa di sana tidak muncul begitu saja, melainkan ditopang oleh "tabungan" kepercayaan yang sangat kuat di antara sesama masyarakat suku Bugis. Identitas etnis ini akhirnya berubah menjadi simbol kehormatan; sebuah nama keluarga bukan lagi sekadar identitas, melainkan sebuah "jaminan" otoritas dan gengsi di mata warga. Dalam kehidupan desa yang sangat mengutamakan kebersamaan, ada rasa bahwa dipimpin oleh keluarga yang sama adalah pilihan paling aman demi menjaga kerukunan dan ketenangan lingkungan.

Di sisi lain, fenomena ini sangat kental dengan pola hubungan patron-klien atau hubungan antara "pelindung" dan "yang dilindungi". Di sini, kepala desa berperan sebagai sosok pelindung yang siap mengulurkan bantuan, membagikan sumber daya, atau memberikan rasa aman bagi warga. Sebagai gantinya, warga membalas kebaikan tersebut dengan kesetiaan politik yang diberikan secara turun-temurun. Hubungan saling menguntungkan ini sayangnya sering kali menjebak masyarakat dalam lingkaran ketergantungan. Akibatnya, kehadiran orang baru di luar lingkaran keluarga dinasti sering dianggap sebagai ancaman yang bisa mengganggu kenyamanan dan pembagian kesejahteraan yang sudah berjalan selama



ini.

Dilihat dari sisi psikolog, bertahannya kekuasaan keluarga di Desa Tangkit Baru bisa dijelaskan melalui Teori Identitas Sosial. Masyarakat di sana memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan identitas mereka sebagai suku Bugis. Secara psikologis, memilih pemimpin yang berasal dari "darah" atau kelompok yang sama memberikan rasa bangga dan rasa aman bersama. Muncul sebuah keyakinan bahwa pemimpin dari keluarga yang sudah dikenal memiliki nama baik yang lebih terjamin dibandingkan orang asing. Rekam jejak keluarga besar mereka seolah menjadi "garansi" bahwa kualitas kepemimpinannya tidak akan mengecewakan.

Lebih jauh lagi, ada pengaruh dari rasa hormat pada aturan tak tertulis dan keinginan untuk tetap sejalan dengan orang banyak (*konformitas*). Di lingkungan desa yang sangat menghargai senioritas dan garis keturunan, ada dorongan batin bagi warga untuk mengikuti pilihan mayoritas agar tidak merasa "berbeda" atau dikucilkan dari pergaulan sosial. Hal ini juga diperkuat oleh rasa terbiasa; karena wajah-wajah dari keluarga petahana sudah sangat sering muncul di depan publik, warga merasa lebih nyaman dan percaya kepada mereka. Secara psikologis, memilih sosok yang sudah akrab terasa jauh lebih tenang daripada harus mengambil risiko dengan memilih orang baru yang belum teruji sejarahnya.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, fenomena dinasti politik di Jambi, khususnya di Desa Tangkit Baru, bukan sekadar masalah aturan hukum, melainkan hasil dari perpaduan kuat antara sejarah politik, struktur sosial, dan kondisi kejiwaan masyarakat. Kekuasaan yang terus berputar di lingkaran keluarga yang sama bisa bertahan karena adanya "tabungan" modal yang lengkap mulai dari dukungan ekonomi, jaringan keluarga yang luas, hingga simbol kehormatan suku (Bugis) yang sangat disegani.

Bagi masyarakat, memilih pemimpin dari keluarga yang sudah dikenal memberikan rasa aman dan kepastian. Namun, di sisi lain, kenyamanan ini menciptakan "tembok tinggi" yang menutup peluang bagi individu-individu berbakat lainnya untuk memimpin. Demokrasi yang seharusnya menjadi ajang pembuktian kemampuan (meritokrasi) akhirnya bergeser menjadi sekadar pelestarian warisan keluarga. Kesimpulannya, dinasti politik di tingkat lokal berhasil mengemas kekuasaan tradisional dalam bungkus demokrasi modern, sehingga regenerasi pemimpin baru menjadi terhambat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, F. (2024). Politik dinasti dan pembaruan sistem demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3), 636–665. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art7>
- Hamid, I. (2020). *Perilaku politik: Dialektika teoritis-empiris untuk penguatan demokrasi di era post truth* (H. M. Zaki, Ed.).
- Nasuhaidi, Anshori, M. W., & Beriansyah, A. (2025). Konstelasi kekuatan politik lokal dalam Pilkada Gubernur Jambi 2024: Studi kasus dari perspektif teori elite. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(2), 317–334.
- Ramadani, A. N. F., Yani, U., & Yolmandari, T. (2020). Dinasti politik dalam pemerintahan Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 4(2), 29–39.



- Ramadhani, Wira (2025) *Politik kekerabatan, dinasti politik, perilaku pemilih, Pemilu, Kabupaten Batanghari*. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.
- Rusnaedy, Z. (2020). *Dinasti politik di aras lokal*. Deepublish.
- Sipahutar, D. (2018). *Perilaku pemilih pemula pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2018: Studi kasus di Pusaran Kota Jambi* [Skripsi Sarjana, Universitas Jambi]. Repositori Universitas Jambi.
- Suardi, W. (2017). Catatan kecil mengenai desain riset deskriptif kualitatif. *Jurnal Ekubis*, 2(1).